



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRI

Siaran Pers
Parlaman Nasional
17 September 2014

**Presiden mendesak Parlemen mengamandemen UU Pensiun
bagi Matan Pejabat Negara dan Mengesahkan UU Anti
Korupsi**

Pada tanggal 15 September 2014, Presiden Taur Matan Ruak mendesak Parlemen Nasional (PN) untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan RUU Anti Korupsi, RUU Pertanahan, RUU Protokol Negara dan amendamen terhadap UU Pensiunan bagi Mantan Pejabat Negara.

Presiden menegaskan hal tersebut dalam acara pembukaan kerja legislatif ketiga Parlemen Nasional setelah masa resesi selama satu bulan. Presiden menegaskan bahwa untuk memberantas korupsi harus diperkuat dengan UU Anti Korupsi dan mengamandemen undang-undang lain yang tidak memberikan keuntungan kepada rakyat seperti UU Mantan Pejabat Negara dan undang-undang lainnya.

“JSMP mendukung desakan Presiden, karena hingga saat ini, PN tidak memiliki rencana legislatif nasional untuk mengidentifikasi agenda prioritas legislatif setiap tahun. Ini akan sangat sulit bagi PN apabila tidak ada sebuah kebijakan nasional mengenai prioritas legislatif,” kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

JSMP berpandangan bahwa ketika PN mengembangkan sebuah rencana legislatif nasional akan sangat membantu PN untuk mengidentifikasi prioritas legislatif setiap tahun. Ini termasuk

perubahan terhadap UU Mantan Penjabat Negara (*Lei Pensaun Vitalisia*) dan UU Anti Korupsi yang seringkali diperdebatkan oleh para anggota parlemen melalui pernyataan politik di PN tanpa didukung oleh sebuah intervensi legislatif atau tindakan konkrit untuk memperkuat institusi-institusi tersebut.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa korupsi mencederai dan melemahkan Negara karena mematikan investasi asing dan melahirkan instabilitas institusional. Oleh karena itu, Presiden Taur mendorong untuk memperkuat investigasi kriminal dan institusi-institusi hukum harus kuat untuk menghadapi korupsi dan dituntut bekerja secara independen tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Presiden memaklumi kritik yang dialamatkan kepadanya mengenai pengampunan diberikan kepada beberapa terpidana pada saat peringatan hari referendum. Namun Presiden menegaskan bahwa keadilan bukan hanya bertujuan untuk memidanakan orang. Tapi hukum bertujuan untuk merehabilitasi dan mengembalikan mereka ke lingkungan mereka. Oleh karena itu, pengampunan yang diberikan bukan sebuah intervensi terhadap pengadilan namun kompetensi yang dimandatkan oleh konstitusi kepada Presiden.

Persoalan lain yang disinggung oleh Presiden selama sambutannya adalah terkait persatuan politik dan sosial, reformasi ekonomi, kesehatan, pendidikan, gender, infrastruktur dan para veteran perang.

Presiden menghimbau kepada semua entitas bangsa terutama kaum laki-laki untuk menolak tindakan kekerasan terhadap perempuan dan mempromosikan keharmonisan keluarga melalui pendidikan, kesehatan untuk mendirikan keluarga yang kuat dan sehat.

Presiden menyampaikan pesan ini, karena banyak perempuan yang menjadi korban dari suami mereka yang seharusnya melindungi

istri dan anak-anak mereka. Namun justru mereka mendapatkan berbagai bentuk kekerasan domestik baik penganiayaan ringan, berat bahkan perlakuan kejam di rumah mereka sendiri.

Hadir dalam acara serimonial ini Perdana Menteri dan anggota kabinetnya, perwakilan diplomatik dan masyarakat sipil.

Untuk informasi lebih lanjut silakang hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org
3323883/77295795
www.jsmp.tl
www.jsmp.facebook.tl